

Kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura

Ambar¹, Wijianto², Winarno³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

* ambaramb45@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 12 Januari 2024

Direvisi: 25 Maret 2024

Disetujui: 2 Mei 2024

Tersedia Daring: 4 Juni 2024

Kata Kunci:

Hasil Belajar Peserta
Kompetensi Pedagogik
Penilaian Proses

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: 1) Menilai kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura. 2) Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMAN Negeri 1 Kartasura. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data dari informan (guru Pendidikan Pancasila), observasi proses pembelajaran dan penilaian peserta didik, serta dokumen seperti bahan ajar kelas X dan XI. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi data dan teknik. Analisis data mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila memiliki kompetensi pedagogik yang baik namun masih terdapat kekurangan dalam pengembangan instrumen penilaian. Proses penilaian dilaksanakan dengan tahapan perumusan tujuan, pemilihan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengelolaan hasil, dan pelaporan. Faktor penghambat melibatkan kesulitan memahami karakter peserta didik, banyaknya kegiatan ekstrakurikuler peserta didik, dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penilaian.

ABSTRACT

Keywords:

Pedagogical Competence
Process Assessment
Student Learning
Outcomes

This research has two main objectives: 1) To assess the pedagogical competence of Pancasila Education teachers in implementing student-centered assessment processes and outcomes at SMA Negeri 1 Kartasura. 2) To analyze the inhibiting factors faced by Pancasila Education teachers in carrying out student-centered assessment processes and outcomes at SMA Negeri 1 Kartasura. This qualitative study sources data from informants (Pancasila Education teachers), observations of the teaching and assessment processes, as well as documents such as teaching materials for grades X and XI. Sampling was conducted using purposive sampling techniques, and data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. Data validation utilized data and technique triangulation. Data analysis followed the steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing as per the Miles and Huberman (1984) approach. The results indicate that Pancasila Education teachers possess good pedagogical competence, but there are still deficiencies in the development of assessment instruments. The assessment process is carried out through the stages of formulating objectives, selecting instruments, conducting assessments, managing results, and reporting. Inhibiting factors include difficulties in understanding student characteristics, the high number of extracurricular activities, and time constraints in conducting assessments.



How to Cite: AmbarA., WijiantoW., & WinarnoW. (2024). Kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.47200/aosagcj.v4i1.2365>

1. Pendahuluan

Profesionalitas, berasal dari "profesi," merujuk pada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai profesi, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan tanpa pelatihan khusus (Cece Wijaya: 1994,1). Profesi ini menuntut persyaratan dan kompetensi spesifik, diakui oleh masyarakat dan pemerintah, dengan kode etik yang diwajibkan (Toatubun, Fathul Arifin, & Muhammad Rijal: 2018,15). Prinsip serupa berlaku untuk profesi guru, di mana guru dianggap sebagai individu dengan keahlian khusus untuk mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Hasbullah, 2017: 108). Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama melibatkan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkat pendidikan (Ika Widyawati, Edy Herianto, Rispawati, 2020: 134). Profesionalitas guru memerlukan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai tingkat pendidikan tertentu (Ika Widyawati, Edy Herianto, Rispawati, 2020: 134). Harapannya, guru harus memiliki profesionalitas keguruan yang memadai untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan memberikan kontribusi positif untuk masa depan negara Indonesia (Susanto, 2020: 56-62). Sistem pendidikan nasional sangat bergantung pada guru sebagai perancang, pelaksana, dan peneliti dalam proses pembelajaran, dengan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 menetapkan empat kompetensi utama, di mana kompetensi pedagogik dianggap paling esensial (Permendikbud No. 70/2013).

Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila mencakup kemampuan dalam mengelola pembelajaran, termasuk pemahaman materi ajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru diharapkan membentuk siswa sebagai warga masyarakat yang baik sesuai dengan kurikulum yang menekankan pengembangan kompetensi sikap bersama dengan pengetahuan dan keterampilan (Permendikbud No. 70/2013). Namun, realitas menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, di mana beberapa guru menghadapi kesulitan dalam menilai aspek sikap dan keterampilan peserta didik (Suprananto M.Ed, 2014). Pemahaman guru terhadap penilaian, hasil dari pelatihan atau bimbingan teknis Kurikulum 2013, masih dianggap rendah oleh sebagian besar (Puspendik). Selain itu, penilaian peserta didik seringkali hanya fokus pada aspek kognitif, tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik (Wahyuni R & Berliani T, 2018).

Penilaian hasil belajar peserta didik dalam Pendidikan Pancasila lebih cenderung menitikberatkan aspek kognitif, dengan aspek keterampilan dan sikap sering diabaikan. Peserta didik juga lebih menghargai penilaian yang berdampak langsung pada nilai akhir, menganggap penilaian terhadap keterampilan kurang signifikan (Delfiyan Widiyanto & Annisa Istiqomah, 2020). Oleh karena itu, tantangan bagi guru Pendidikan Pancasila adalah mengembangkan penilaian yang mencakup semua aspek pembelajaran, mendukung

pengembangan siswa sebagai warga negara aktif dalam masyarakat (Delfiyan Widiyanto & Annisa Istiqomah, 2020). Data Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2019 menunjukkan nilai kompetensi pedagogik di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar sebesar 57,80 dan 56,75, sedangkan Kabupaten Boyolali mencapai 56,31 untuk jenjang PAUD-SMA/SMK. Meskipun melebihi rata-rata UKG tahun 2019 sebesar 50,50, nilai tersebut masih lebih rendah daripada nilai Kota Surakarta yang mencapai 60,16 (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud: 2019).

Penelitian oleh Akhmad Riadi (2017) menunjukkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar peserta didik sering terfokus pada ranah pengetahuan, bahkan belum mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran. Solusi yang diusulkan termasuk peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran, lokakarya, seminar, atau mengundang tutor dari kementerian. Guru juga perlu memperkuat kompetensi pedagogiknya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan membantu mereka berhasil dalam proses belajar (Indri Okta Sari, Junaidi Indrawadi, & Al Rafni: 2019). Kemampuan guru dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik merupakan aspek integral dari kompetensi pedagogik guru. Meilani Fatzuarni (2022) menyoroti bahwa ketidakmampuan guru memiliki kompetensi pedagogik, terutama pengetahuan tentang cara melakukan penilaian dengan benar, dapat merugikan moral guru. Guru yang tidak mampu melakukan penilaian dengan benar dapat menunjukkan perilaku kurang etis, seperti manipulasi nilai, yang berdampak pada rendahnya motivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Fitri Kurnia (2018) dan Adhistami Putri Pradani (2019), menunjukkan bahwa guru sering kali melakukan penilaian secara subjektif dan belum sepenuhnya mengembangkan instrumen penilaian yang baik. Sementara itu, penelitian oleh Septian Jatniko Isfandika & Arif Purnomo (2022) dan Naryo (2022) menunjukkan bahwa guru sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan alat penilaian dan instrumen penilaian sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Fokus penelitian mencakup identifikasi hambatan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Pancasila dalam melakukan penilaian, dengan pra-penelitian awal di SMAN 1 Kartasura menunjukkan bahwa penilaian masih terfokus pada ranah kognitif dan belum sepenuhnya mencakup aspek sikap dan keterampilan. Penilaian ini memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang baik dan diharapkan mencakup tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan nilai sikap kewarganegaraan (Winarno: 2013, 25-27). Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang kemampuan pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam mengimplementasikan penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum, serta memahami hambatan yang dihadapi dalam konteks Kurikulum Merdeka.

2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data dari informan (guru Pendidikan Pancasila), observasi proses pembelajaran dan penilaian peserta didik, serta dokumen seperti bahan ajar kelas X dan XI. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi data dan teknik. Analisis data mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman (1984).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kompetensi Guru Pendidikan Pancasila dalam Melaksanakan Penilaian Proses dan Hasil Belajar yang Berfokus pada Peserta Didik di SMA Negeri 1 Kartasura

Penilaian hasil peserta didik mengacu pada standar penilaian kurikulum Merdeka sebagaimana diatur dalam Peraturan Kemendikti Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Langkah-langkah penilaian melibatkan beberapa tahapan:

1) Menetapkan tujuan penilaian.

Guru Pendidikan Pancasila memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dikenal dengan sebutan Model Ajar. Sehingga dalam merumuskan tujuan penilaian ini sama dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dicantumkan yaitu 10.1 Peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang baik menurut Baker (1971) mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Conditioning, Degree). Dalam tujuan pembelajaran 10.1 tersebut belum mengandung unsur ABCD karena tidak mencantumkan degree. Tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara, guru Pendidikan Pancasila sebelum melaksanakan penilaian membuat kisi-kisi penilaian. Hal ini bertujuan mempermudah guru dalam melaksanakan penilaian. Hal tersebut sejalan dengan H. Djaali, Pudji Muljono (2008) bahwa kisi-kisi dibuat untuk menjamin sampel soal yang baik, berarti mencakup semua pokok bahasan secara proporsional. Agar butir-butir tes mencakup seluruh materi, baik pokok bahasan atau sub bahasan secara proporsional maka sebelum menulis butir-butir tes terlebih dahulu guru harus membuat kisi-kisi sebagai pedoman. Kisi-kisi harus mencakup semua aspek kemampuan yang hendak dinilai.

2) Memilih atau mengembangkan instrumen penilaian.

Berdasarkan hasil temuan studi pada saat pembelajaran berlangsung guru Pendidikan Pancasila SMA Negeri 1 Kartasura melakukan pengembangan instrument penilaian pada awal pembelajaran, ini dilihat dari pemberian penilaian diagnostik/pertanyaan pada awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik. Pada saat pembelajaran guru Pendidikan Pancasila memberikan penilaian formatif kepada peserta didik dengan tujuan untuk refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan. Biasanya guru Pendidikan Pancasila menggunakan teknik penilaian tulis/lisan. Dan yang terakhir yaitu pada akhir pembelajaran, guru Pendidikan Pancasila melakukan penilaian sumatif untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik selama satu semester. Tetapi guru Pendidikan Pancasila dalam Modul ajar yang dibuat hanya mencantumkan instrument penilaian pada ranah afektif saja. Hal tersebut sejalan dengan Warsiyah, Dkk (2023, Hal. 11-13) bahwa dalam pemilihan dan atau pengembangan instrument penilaian guru mengembangkan instrument penilaian untuk awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan akhir pembelajaran.

3) Melaksanakan penilaian.

Pelaksanaan penilaian dapat dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung atau diakhir pembelajaran. Janawi (2011) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penilaian dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a) Menentukan kriteria aspek penilaian pembelajaran

Berdasarkan temuan hasil studi, guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura sebelum memulai pembelajaran selalu memberikan pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Anizar dan Sardin (2023)

menjelaskan bahwa prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar salah satunya yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik, dan mencerminkan karakteristik peserta didik. Sehingga dalam melakukan penilaian guru juga merujuk pada prinsip pembelajaran tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Dini Faizah, Padi Utomo, dan M. Arifin (2018): "pertanyaan yang diajukan oleh guru selama proses pembelajaran tidak hanya dapat meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga dapat berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian pendekatan, metode, dan teknik pengajaran di kelas. Selain itu, pertanyaan tersebut dapat membantu menilai kesesuaian materi yang diajarkan dengan situasi, kondisi, tujuan pembelajaran, serta kebutuhan siswa".

b) Menyusun alat penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran

Dari hasil temua studi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura menggunakan alat penilaian pada setiap ranah berbeda-beda. Pada ranah kognitif guru Pendidikan Pancasila menggunakan alat ukur berupa tes, baik tes tulis maupun tes lisan. Sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotor guru Pendidikan Pancasila menggunakan alat ukur berupa observasi. Alat ukur yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik berbeda-beda, tergantung pada informasi apa yang akan dikumpulkan. Dalam menyusun alat ukur untuk penilaian juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Qomari (2008, Hal. 3) yang menjelaskan bahwa "tes adalah salah satu metode penilaian yang efektif untuk mengukur pencapaian kognitif, terutama melalui tes tertulis". Namun guru Pendidikan Pancasila dalam menyusun alat ukur dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik pada ranah psikomotor tidak tepat apabila menggunakan observasi. Karena dalam ranah psikomotor yang diukur yaitu kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan materi atau pengetahuan yang sudah didapatkan pada saat proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Majid (2017, Hal. 78) yang menjelaskan bahwa "guru dalam melaksanakan penilaian pada ranah psikomotorik melalui penilaian kinerja, di mana peserta didik diminta untuk menunjukkan kompetensi melalui berbagai bentuk seperti uji praktik, proyek, dan penilaian portofolio".

c) Menggunakan jenis penilaian dan teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan

Berdasarkan hasil temuan studi menunjukkan guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif saja, penilaian pada awal pembelajaran atau penilaian diagnostik tidak dilaksanakan. Penilaian diagnostik sangat perlu dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam belajar sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembelajaran oleh guru. Hal ini sesuai dengan Ardiansyah, dkk (2023) dalam Assesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang menyebutkan "Penilaian diagnostik merupakan suatu evaluasi yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kemampuan, kelebihan, dan kelemahan siswa. Tujuan dari penilaian ini adalah agar desain pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan dan status individu siswa. Hasil dari penilaian diagnostik dapat berfungsi sebagai dasar atau titik awal bagi pendidik untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing siswa".

d) Mendokumentasikan hasil penilain proses dan hasil belajar peserta didik
Berdasarkan temuan hasil studi guru Pendidikan Pancasila menerapkan prinsip-

prinsip penilaian, yaitu adil, dapat dipercaya dan terbuka. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dimana guru memberikan penjelasan sebelum melaksanakan penilaian, memberikan penjelasan terkait skor tiap soal tes, dan memberikan remedi atau pengayaan terhadap peserta didik yang belum mencapai kriteria kecapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dalam Kurikulum Merdeka pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Berdasarkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah bahwa "penilaian harus direncanakan dengan adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (reliable) agar dapat menggambarkan kemajuan belajar secara akurat. Selain itu, penilaian juga diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. Hasil penilaian yang handal juga menjadi dasar yang kuat untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik".

- e) Mengidentifikasi keberhasilan penilaian proses dan hasil belajar Berdasarkan hasil temuan studi Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura menyebutkan bahwa dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dalam menentukan keberhasilan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Tetapi guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura masih menggunakan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70 sebagai patokan keberhasilan penilain hasil belajar peserta didik. Peserta didik dikatakan berhasil dalam penilaian dan belajarnya, apabila dapat mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, Ulfah&Opan Arifud (2021). Hal tersebut sesuai dengan Kahar (2022) bahwa "Dalam Kurikulum Merdeka keberhasilan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lagi digunakan dan berganti menjadi (KKTP)".
- f) Menggunakan hasil penilaian sebagai bahan remedial dan pengayaan Hasil temuan studi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila setelah proses penilaian dan hasil belajar peserta didik diketahui, guru Pendidikan Pancasila menggunakan hasil penialain untuk bahan remisial dan pengayaan. Dalam melaksanakan kegiatan remedial untuk peserta didik yang nilai nya belum tuntas dan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas. Pemberian remedial ini dilakukan dengan memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan ulang, memberikan tugas portofolio, atau dengan merangkum materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dilakukan dengan cara melakukan remedial atau pengayaan. Dalam Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (2022: 35) menjelaskan bahwa guru dapat melaksanakan remedial dan pengayaan dengan menggunakan interval untuk nilai tes untuk meningkatkan nilai peserta didik. Anizar dan Sardin (2023) menjelaskan bahwa dalam Kurikulum Merdeka belajar terdapat 3 tahapan dalam penilaian yaitu remedial, pelaporan, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik. Namun remedial yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Pancasila ini tidak sesuai dengan Antonius (2022) bahwa "remedial bukan mengulang tes dengan materi yang sama, tetapi guru memberikan intervensi/tindakan perbaikan pembelajaran pada lingkup materi yang belum dikuasai oleh peserta didik melalui upaya tertentu. Setelah perbaikan pembelajaran dilakukan, guru melakukan tes untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi dari tujuan pembelajaran yang diremedialkan". Sedangkan pemberian pengayaan dilakukan dengan memberikan tugas untuk membaca dan meringkas bab/materi selanjutnya. Izzati (2015: 57- 58)

berpendapat bahwa pengayaan berfungsi sebagai program upaya membantu peserta didik yang mendapatkan nilai akademik bagus untuk terus memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

4) Mengumpulkan dan mengolah hasil penilaian.

Hasil temuan studi guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 kartasura, berdasarkan wawancara guru Pendidikan Pancasila mengelola hasil penilaian dengan data kuantitatif. Yaitu dengan memberikan nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tes lisan maupun tertulis. Hal ini sejalan dengan Panduan Pembelajaran dan Asesmen (2021) bawa hasil penilaian perlu diolah untuk menjadi capaian dari tujuan pembelajaran peserta didik. Guru dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil penilaian tujuan peserta didik dan dapat juga menggunakan data kuantitatif dan mendiksi secara kualitatif. Pemberian nilai ini berdasarkan pada kriteria capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru Pendidikan Pancasila dalam Modul Ajar

5) Memberikan laporan hasil penilaian

Hasil penilaian dituangkan dalam laporan kemajuan belajar atau dalam bentuk rapor. Laporan hasil belajar peserta didik paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik.

Lebih lanjut untuk memperkuat data sebelumnya, peneliti juga melakukan penilaian kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian berdasarkan Permendiknas no 16 tahun 2007, Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penilaian kompetensi pedagogik kedua narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa narasumber pertama memiliki skor sebesar 78 dengan predikat cukup, ini lebih rendah jika dibandingkan dengan narasumber kedua. Narasumber kedua memperoleh skor 82 dengan predikat baik. Walaupun terdapat perbedaan dalam skor yang diperoleh dan skor perolehan berada diatas 71 maka dengan demikian kedua narasumber dikatakan memiliki kompetensi pedagogik khususnya dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

b. Faktor-faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura

Secara umum faktor-faktor penghambat penilaian proses dan hasil belajar peserta didik khususnya berkaitan dengan kompetensi pedagogik yang dhadap oleh Guru pendidikan Pancasila, yaitu diuraikan menjadi 3 poin sebagai berikut:

1) Sulit dalam memahami setiap karakter peserta didik

Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura tidak hanya untuk satu peserta didik atau satu kelas saja melainkan beberapa kelas yang diampu oleh guru Pendidikan Pancasila tersebut. Oleh karena itu seorang guru harus dapat memahami karakter peserta didik untuk mengetahui bakat dan minat peserta didik. Karena salah satu kompetensi pedagogik guru perlu dimengerti yaitu dapat memahami karakteristik peserta didik. Janawi (2011, hal. 65- 66) menyatakan bahwa menguasai karakteristik peserta didik berhubungan dengan kemampuan guru dalam memahami kondisi anak didik. Anak dalam dunia pendidikan modern adalah subyek dalam proses pembelajaran. Anak tidak dilihat sebagai obyek pendidikan, karena anak merupakan sosok individu yang membutuhkan perhatian dan sekaligus berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Anak juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya baik dari segi minat, bakat, motivasi, daya serap mengikuti pelajaran, tingkat perkembangan, tingkat inteligensi, dan memiliki perkembangan sosial tersendiri. Namun hal tersebut masih sulit dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura karena guru Pendidikan Pancasila tidak hanya mengajar satu kelas saja melainkan beberapa kelas sehingga guru tidak dapat memahami satu satu karakteristik peserta didik, sehingga dalam melaksanakan penilaian guru Pendidikan

Pancasila masih kesulitan, terutama dalam penilaian sikap. Karena guru Pendidikan Pancasila masih sulit dalam menghafal karakter setiap pesertadidik.

- 2) Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik
Jevri Geovani (2013, hal.4) mengemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar jam pelajaran terprogram, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat dan bakat peserta didik serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini peserta didik diberi kebebasan untuk memilih jenis kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini akan menyita waktu belajar dan istirahat peserta didik sehingga peserta didik tidak dapat belajar dengan maksimal. Hal ini tentunya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Maka aspek banyak kegiatan yang diikuti oleh peserta didik menjadi faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian. Karena guru Pendidikan Pancasila sulit dalam mengetahui kompetensi dasar yang sudah dikuasai peserta didik. Apabila peserta didik yang banyak kegiatan tersebut diberikan penilaian yang sama dengan peserta didik lain maka nantinya tidak dapat mencapai kompetensi yang sudah ditentukan.
- 3) Kurangnya waktu dalam melaksanakan penilaian
Aspek waktu menjadi faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Materi yang banyak tentunya juga memakan waktu yang banyak untuk proses penilaiannya. Terlebih penilaian tidak hanya untuk satu ranah melainkan harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

4. Kesimpulan

Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura memiliki keahlian pedagogik yang baik, terutama dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Meskipun telah menguasai kompetensi pedagogik, terdapat kekurangan dalam pengembangan instrumen penilaian, khususnya pada ranah kognitif. Modul Ajar hanya mencakup instrumen untuk ranah afektif, psikomotor, dan LKPD, perlu perbaikan dengan menambahkan instrumen untuk ranah kognitif. Tahapan penilaian melibatkan perumusan tujuan, pemilihan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengelolaan hasil, dan pelaporan. Namun, dalam pelaksanaan penilaian, guru menghadapi tiga faktor penghambat, yaitu kesulitan memahami karakter peserta didik, banyaknya kegiatan ekstrakurikuler peserta didik, dan keterbatasan waktu. Perbaikan dalam memahami karakter siswa dan manajemen waktu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penilaian.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, A. M. (2022). *Penerapan Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi Pada Anak)*. An Nisa', 15(1). Hal. 1–8. <https://jurnal.iain-bone.ac.id>
- Ahmadi. (2017). *Studi Tentang Penguasaan Kompetensi Pedagogik Guru PKn dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada SMA Negeri 1 Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Hal. 1-18. UPT Perpustakaan UNM
- Anizar & Sardin. (2023). *Evaluasi pada Kurikulum Merdeka dan Pemanfaatan Hasil Penilaiannya*. Majalengka: Edupedia Publisher
- Anwar, Muhamma. (2018). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asrul, Ananda, R., & Rosinta. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Citapustaka Media.

- Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. (2021). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Cece, Wijaya. (1994). *Kemampuan Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2007. *Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Dewi, M. R. (2023). *Kelebihan dan Kekurangan Project Based Learning untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka*. 19(2), 213–226. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK>
- Eltria, Anita. (2018, Februari 26). Pentingnya Evaluasi Pembelajaran dalam Pendidikan. Diperoleh 10 September 2023 dari <https://www.kompasiana.com/>
- Faizah, D, Utomo, P, & Arifin, M. (2019). Analisis Pertanyaan Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 253–260. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6780>
- Fatzuarni, M. (2022). Pentingnya Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1–10.
- Febriana, Rina. (2019). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fitri Kurnia. (2018). Kemampuan Guru Melakukan Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Bayt Al-Hikmah, Pasuruan. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 6(2), 1–9. <http://ejournal.kopertais4.or.id/>
- Gafur, A. (2012). *Desain Pembelajaran Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ombak.
- Geovani, Jevri. (2013). *Tingkat Kematangan Sosial pada Siswa Kelas Xi Anggota Kegiatan Ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. [Skripsi Tidak Dipublikasikan]. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hasbullah. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Rajawali Pers.
- Isfandika, S. J., & Purnomo, A. (2022). Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Alat Evaluasi Pembelajaran Daring Mata Pelajaran IPS Semarang. 4(2), 109–118. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>
- Janawi. (2011). *Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta
- Juwantara, R. A. (2019). Kemampuan Guru Melakukan Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 8(5), 55 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/4658>
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhrudin, Hamdani, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Magdalena, I. (2019). *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Samudra biru

- Majid, N.K., Raharjo, T.K., & Supriyadi. (2017). Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik Unjuk Kerja pada Mata Pelajaran IPA di SDN Jlamprang dan SDN Wonosari 03 Kabupaten Batang. *Journal of Educational Research and Evaluation*. 6(1): 55-62 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere/article/view/16208>
- Mawaddah, Fitri Sagita. (2023). Assesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar. 3 (1): 8–13. <https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/JLPI/article/view/361/297>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Mulyasa, E. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. (2007). *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Dasar Pemahaman dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Musriadi. (2016). *Profesi Kependidikan Secara Teoritis dan Aplikatif Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Deepublish
- Nasution. (2013). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Naryo. (2022). Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Evaluasi Hasil Belajar Melalui Lokakarya Berkesinambungan di SMPN 56. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13, 13–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1416>
- Nurjan, Syarifan. (2015). *Profesi Keguruan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. (2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diperoleh 31 Januari 2023, dari <https://npd.kemdikbud.bo.id/?=ukg>
- Riyadi, A. (2017). Kompetensi Guru dalam Pelaksanaan Evaluasi pembelajaran. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15 (28), 52–67.
- Rohmawati, R., & dan Moh Muchtarom, T. (2016). *Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara*. 11, 298–311. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v15i28.1933>
- Sari, I. O., Indrawadi, J., & Rafni, A. (2019). Kompetensi Pedagogik Guru PPKn dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 1 Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 2(3), 149–159. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i3.158>
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 61. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2285>
- Sofyan Ahmad, Tonih Feronika, & Burhanudin Milama. (2019). *Evaluasi Pembelajaran Sains Berbasis Kurtilas*. Yasmi
- Spencer, Lyle M, and Spencer, Singe M. (1993). *Competence at Work: Modek for Superior Performarce*. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Subandiyah. (1993). *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudjana, N. (2006). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

- Sukardi. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suprananto M.Ed. (2014). Kompetensi Pendidik Dalam Bidang Penilaian. *Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan (SNEP), II*, 1–6
- Surapranata, Sumarna dan Hatta, Muhammad. (2004). *Penilaian Portofolio Implementasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Sutikno, M. S. (2021). *Strategi Pembelajaran*.Indramayu: CV. Adanu Abimata
- Sutopo,H,B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Susanto, Heri. (2020). *Profesi Keguruan*. Universitas Lambung Mangkurat: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Toatubun, Fathul Arifin dan Muhammad Rijal. (2018). *Profesionalitas dan Mutu Pembelajaran*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Usman,Moh User. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja.
- Wahyuni, R., & Berliani, T. (2018). Pelaksanaan Kompetensi Pedagogik Guru di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 27(2), 108–115. <https://doi.org/10.17977/um009v27i22018p108>
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2020). Evaluasi Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 51–61. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5385>
- Widyawati1, Ika, Herianto,Edy, R. (2020). Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengembangkan Tahapan Penilaian Sikap Sosial pada Mata Pelajaran PPKn di SMPN Se-Kota Mataram. *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 134-135. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara